



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELIAS HAMONANGAN
2. Jabatan : HAKIM AD-HOC
3. NHK : 480809

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.910.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/75 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, Rp. 250.000.000		
2. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, Rp. 100.000.000		
3. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , Rp. 400.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, Rp. 60.000.000		
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	110.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	153.282
F. HARTA LAINNYA	Rp.	590.735.200
Sub Total	Rp.	2.610.888.482



III. HUTANG

Rp. 286.644.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.324.244.482

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.